



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



**DINAS  
PERIKANAN  
TAHUN 2023**



# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat tersusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang ditetapkan.

LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yang diturunkan ke Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai penjabaran atas rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk terciptanya good governance sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang baik untuk mewujudkan pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang Perikanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk Penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SAMPANG



**Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651229 199403 1 002

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
A. Struktur Organisasi.....	2
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Isu Strategis.....	6
D. Cascading Kinerja .....	6
E. Pohon Kinerja .....	8
E. Peta Proses Bisnis .....	13
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) .....	20
<b>BAB II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 .....	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	25
<b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Capaian Kinerja Anggaran .....	43
C. Tindak Lanjut LHE.....	47
<b>BAB IV. Penutup</b> .....	<b>49</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintah yang baik merupakan penyempurnaan sistem dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten sampam dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan system manajemen pemerintahan yang berpedoman pada azas akuntabilitas dan transparan dimana setiap penyelenggaraan Negara wajib untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program/kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

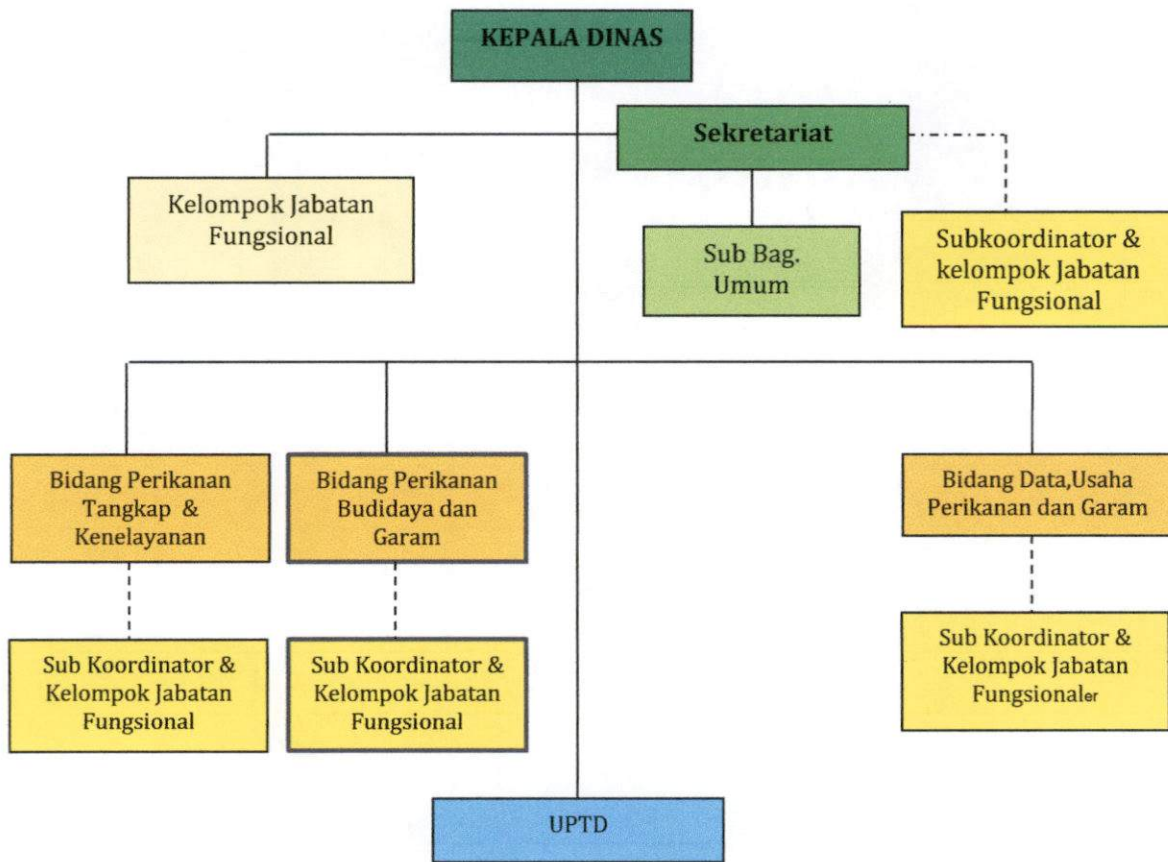
Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini disusun dengan maksud memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan laporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Sampang diwajibkan untuk menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sampang nomor 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas





Personel Dinas Perikanan Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Jabatan struktural terdiri dari sekretaris, bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap dengan total karyawan sebanyak 24 orang. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perikanan Budidaya dan garam, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Data, Usaha Perikanan dan Garam, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD Dinas

perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap serta bidang data, usaha Perikanan dan Garam.

### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;



- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## 2. Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan tangkap dan kenelayanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap dan kenelayanan;
- Perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap dan Kenelayanan;
- Perumusan kebijakan teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap dan Kenelayanan;
- Perumusan kebijakan Pembinaan dan pengembangan organisasi/kelembagaan nelayan;
- Perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu perikanan tangkap dan Kenelayanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 3. Bidang Perikanan Budidaya dan Garam

Bidang Perikanan Budidaya dan Garam mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan budidaya dan garam. Untuk melaksanakannya, Bidang Perikanan Budidaya dan garam mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan dan evaluasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan garam;
- Perumusan, pemetaan dan pengembangan wilayah serta konservasi perikanan budidaya dan garam;
- Perumusan kebijakan teknis produksi perikanan budidaya dan garam serta kelembagaan pembudidaya ikan dan petambak garam;
- Penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Dinas
- Pembinaan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan pengendalian lingkungan budidaya;

#### 4. Bidang Data, Usaha Perikanan dan Garam

Bidang Data Usaha Perikanan dan Garam mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang data, usaha perikanan dan garam. Untuk melaksanakan tugas di atas bidang data, usaha perikanan dan garam mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan pengolahan, penyediaan dan penyajian data perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan promosi produk perikanan dan garam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

##### a. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

##### b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Subkoordinator diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usul



masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati. Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantikan.

### C. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Hasil analisa isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sampang diantaranya :

1. Masih minimnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan budidaya
2. Masih kurangnya sarana prasarana bidang Perikanan
3. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil Perikanan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat;
4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan baik berupa pemberian jaminan social bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan

### D. CASCADING KINERJA DINAS PERIKANAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan adalah misi 2 yaitu **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**.

Setelah visi dan misi ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang diwujudkan

adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai sasaran strategi bersifat outcome atau apa yang ingin dilakukan atau apa yang seharusnya dimiliki.

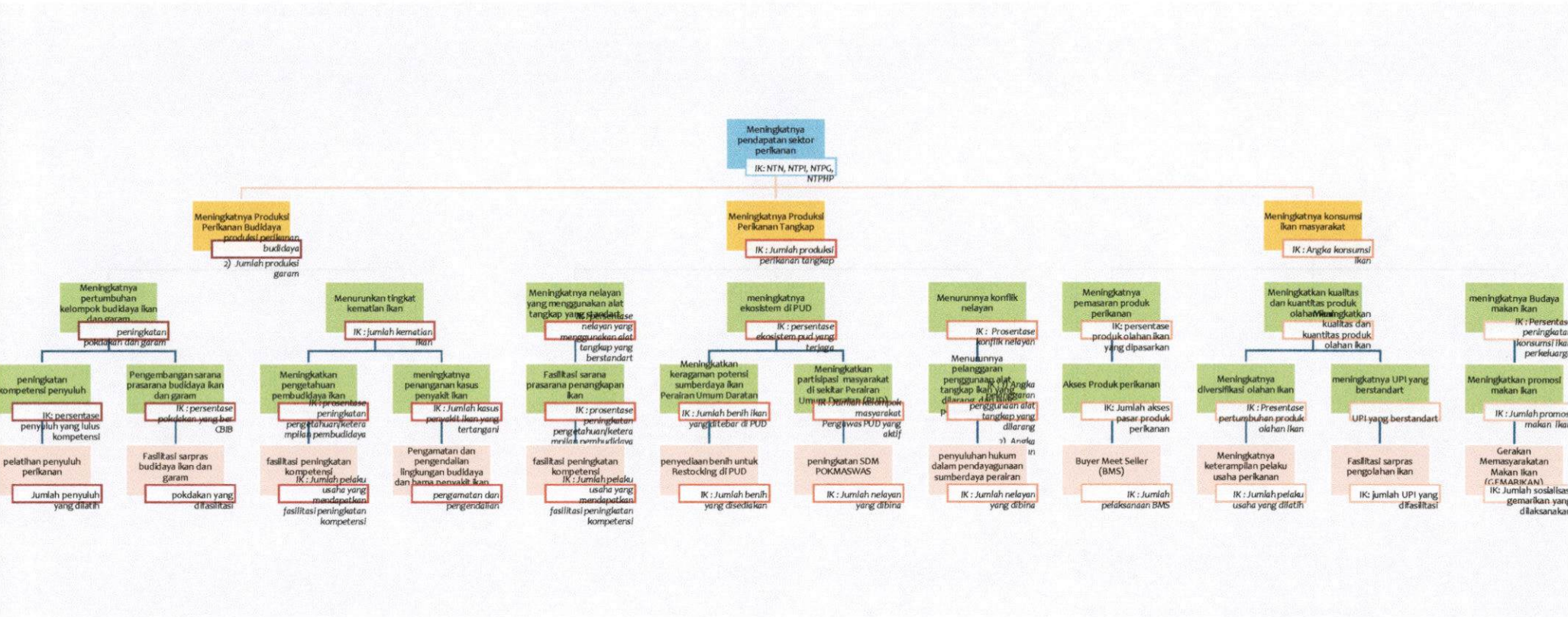
**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sampang dengan Renstra OPD**  
**Tahun 2019-2024**



Peta strategi menjadi acuan setiap karyawan dalam organisasi memiliki gambaran/cita-cita yang sam

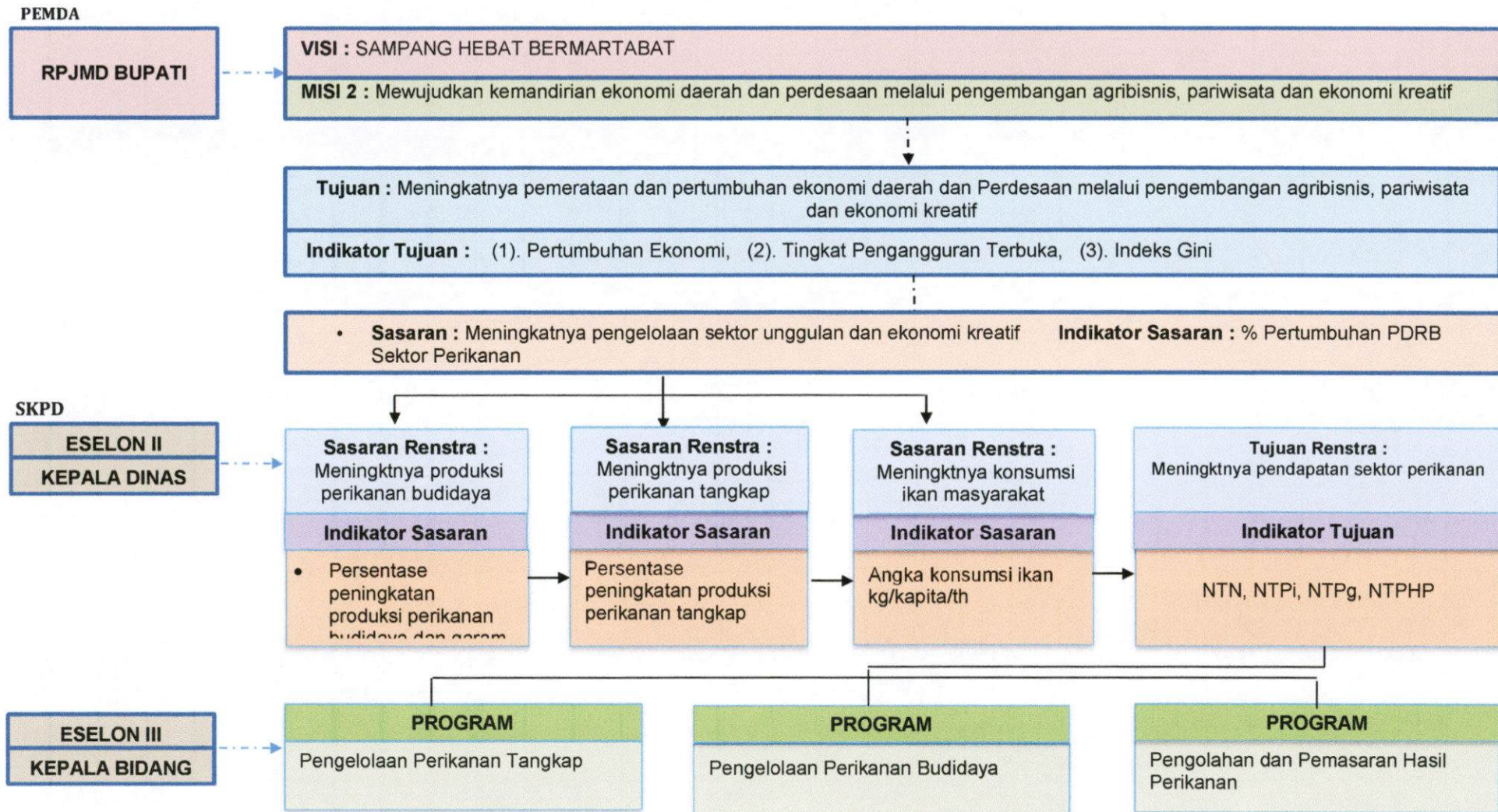


Gambar 1.3  
Pohon Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022

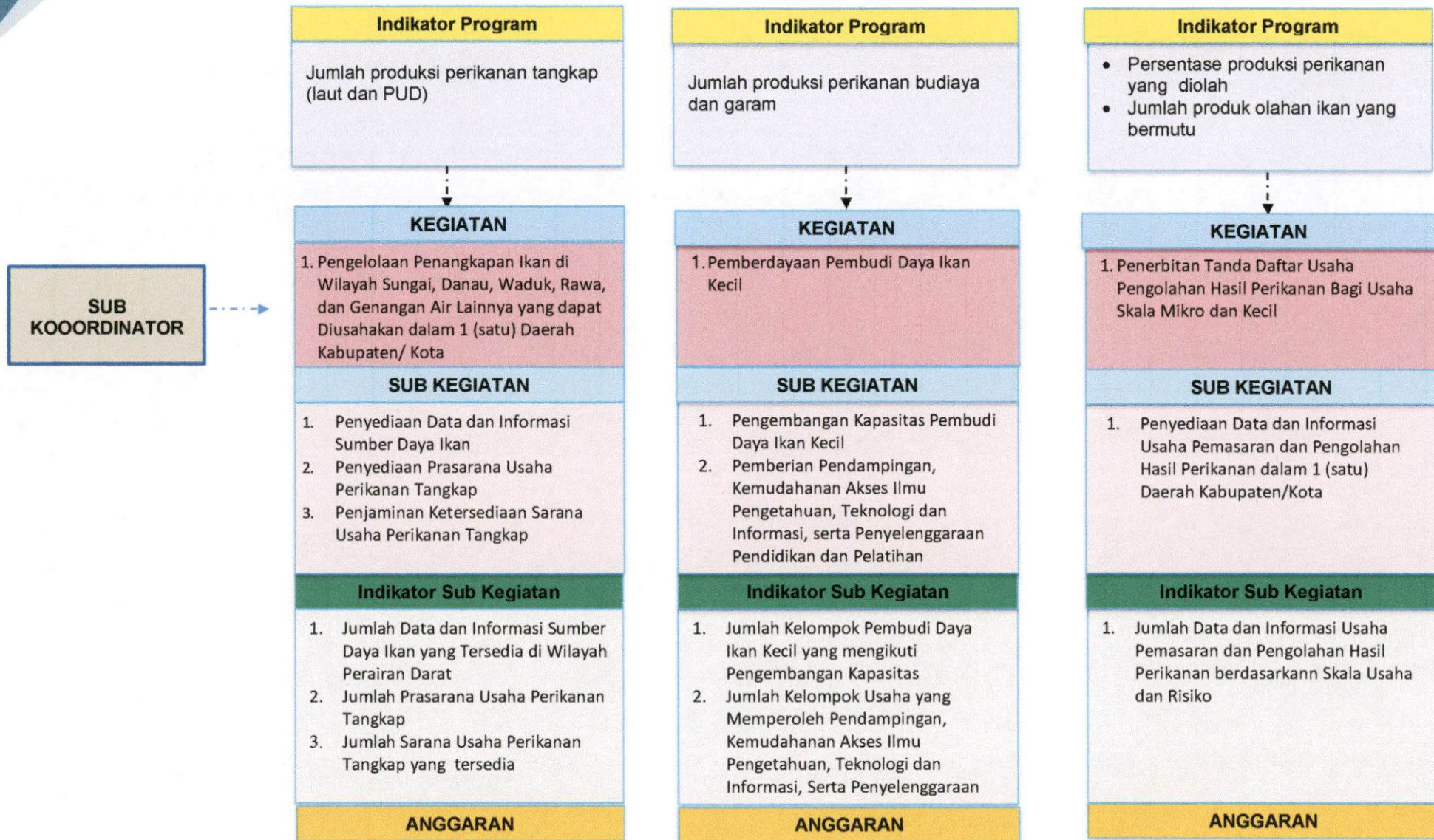




**Gambar 1.4**  
**Cascading Dinas Perikanan Tahun 2022**









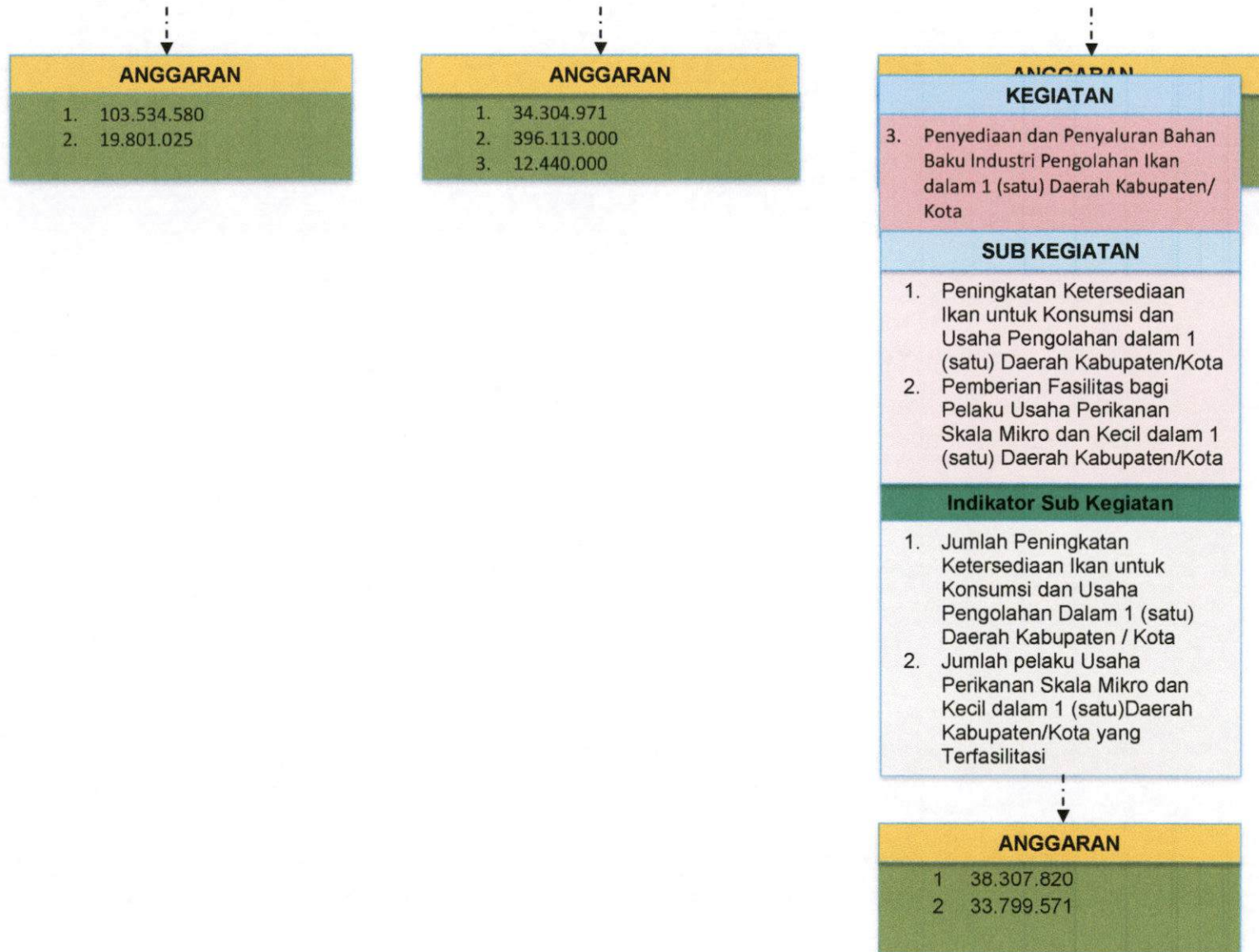
**SUB  
KOOORDINATOR**

<ol style="list-style-type: none"> <li>48.355.700,00</li> <li>335.343.444,00</li> <li>76.589.839,00</li> </ol>
<p align="center"><b>KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
<p align="center"><b>SUB KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</li> <li>Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</li> </ol>
<p align="center"><b>Indikator Sub Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya</li> <li>Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1.053.938.670,00</li> <li>83.324.618,00</li> </ol>
<p align="center"><b>KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</li> </ol>
<p align="center"><b>SUB KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
<p align="center"><b>Indikator Sub Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</li> <li>Jumlah Prasarana Peembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</li> <li>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang teruji melalui Pengeloolaan Kesehatan Ikan</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>102.797.791,00</li> </ol>
<p align="center"><b>KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</li> </ol>
<p align="center"><b>SUB KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</li> </ol>
<p align="center"><b>Indikator Sub Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko</li> </ol>





Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

#### **E. PETA PROSES BISNIS**

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang :



**PROSES****PROSES BISNIS MANAJEMEN**

- Pengelolaan Kinerja
- Kepatuhan Internal
- Pengelolaan Resiko

**PROSES BISNIS INTI**

- Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan garam
- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
- Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat

**PROSES BISNIS PENDUKUNG**

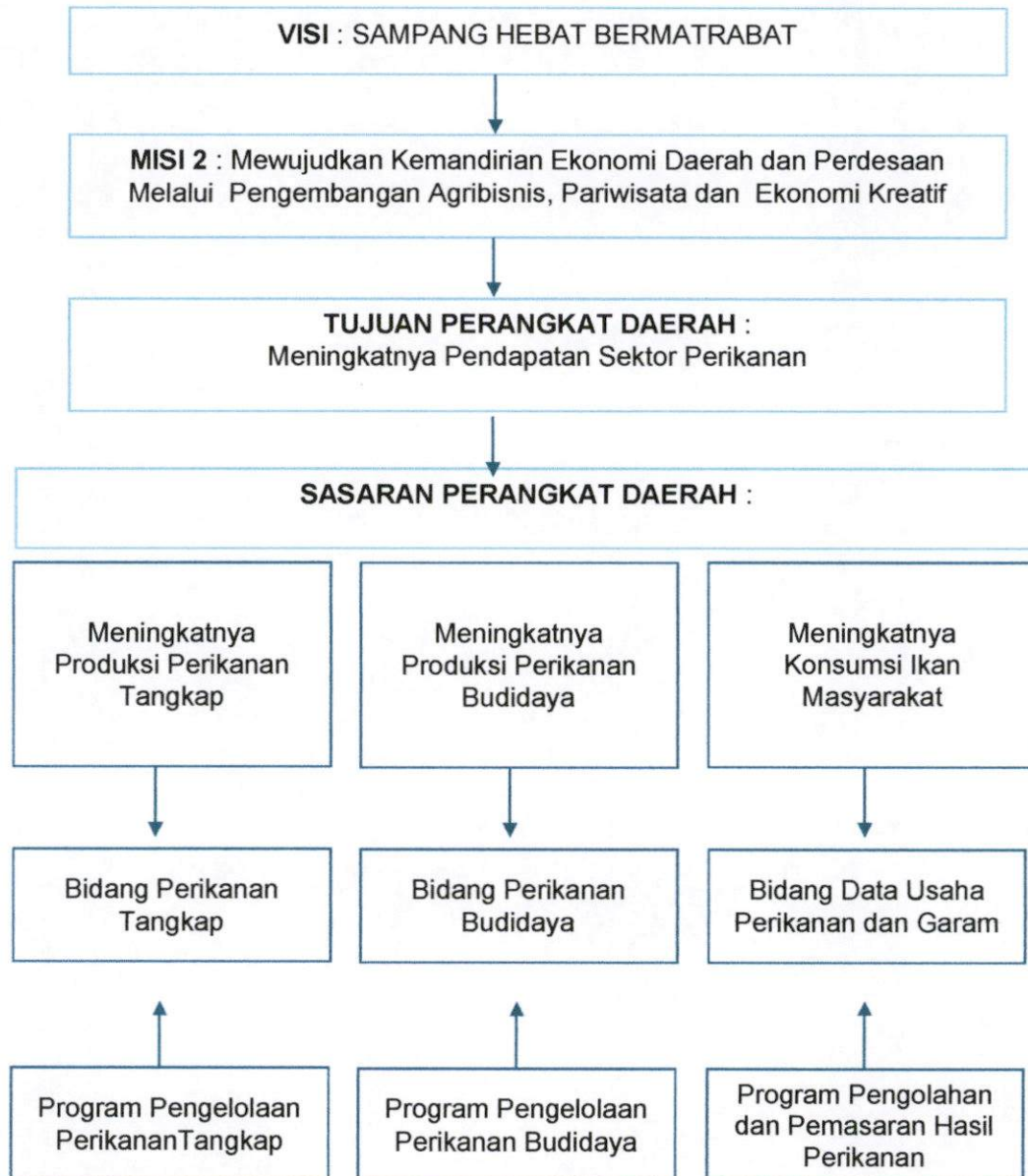
- Peraturan Perundang Undangan (Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan)
- Sumber Daya Manusia
- Ketersediaan Sarana & Prasarana
- Perencanaan yang Baik
- Ketersediaan Anggaran yang Cukup

**TUJUAN**

Meningkatkan Pendapatan sektor Perikanan

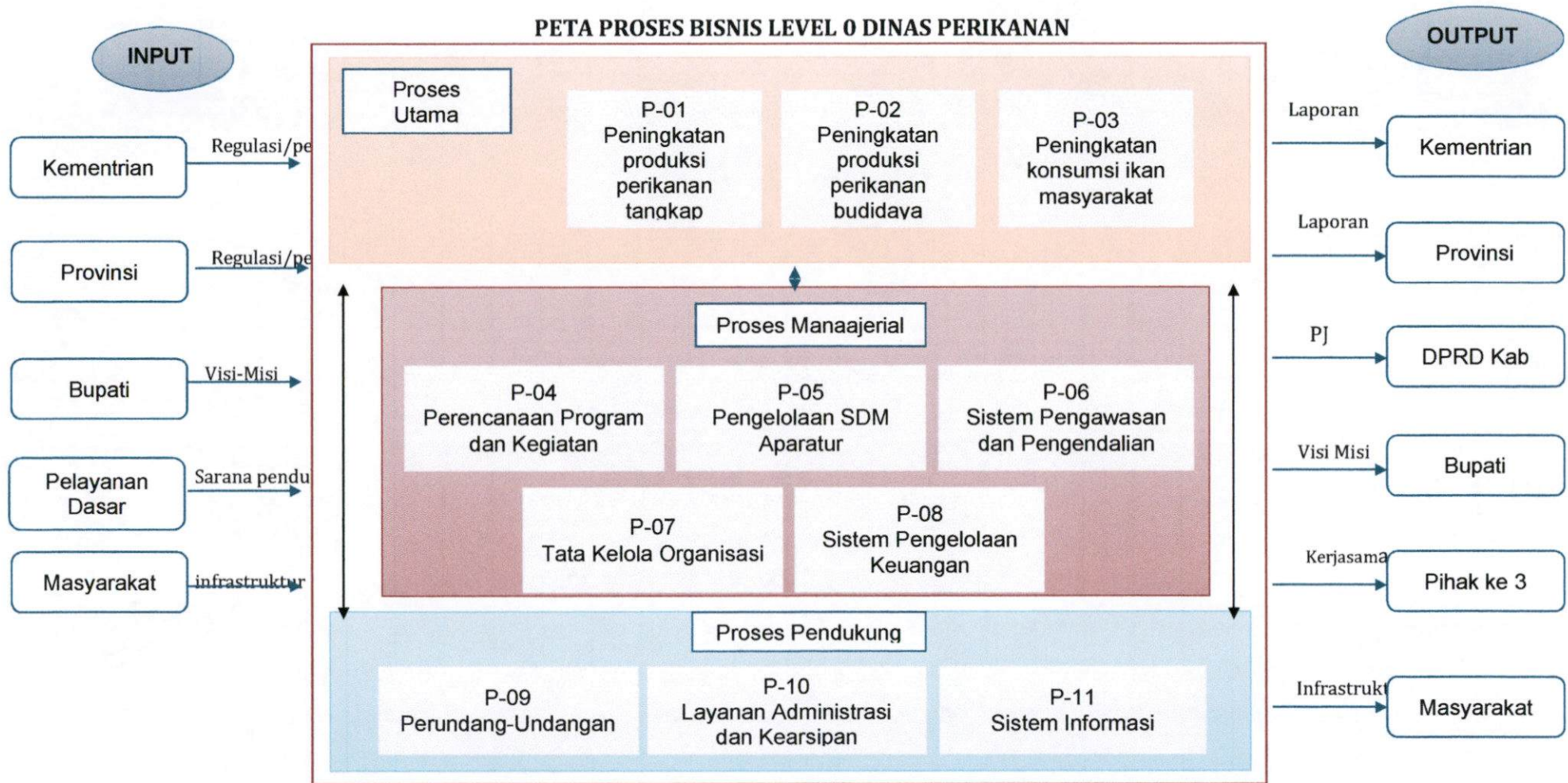


### A. PETA PROSES BISNIS UTAMA DINAS PERIKANAN

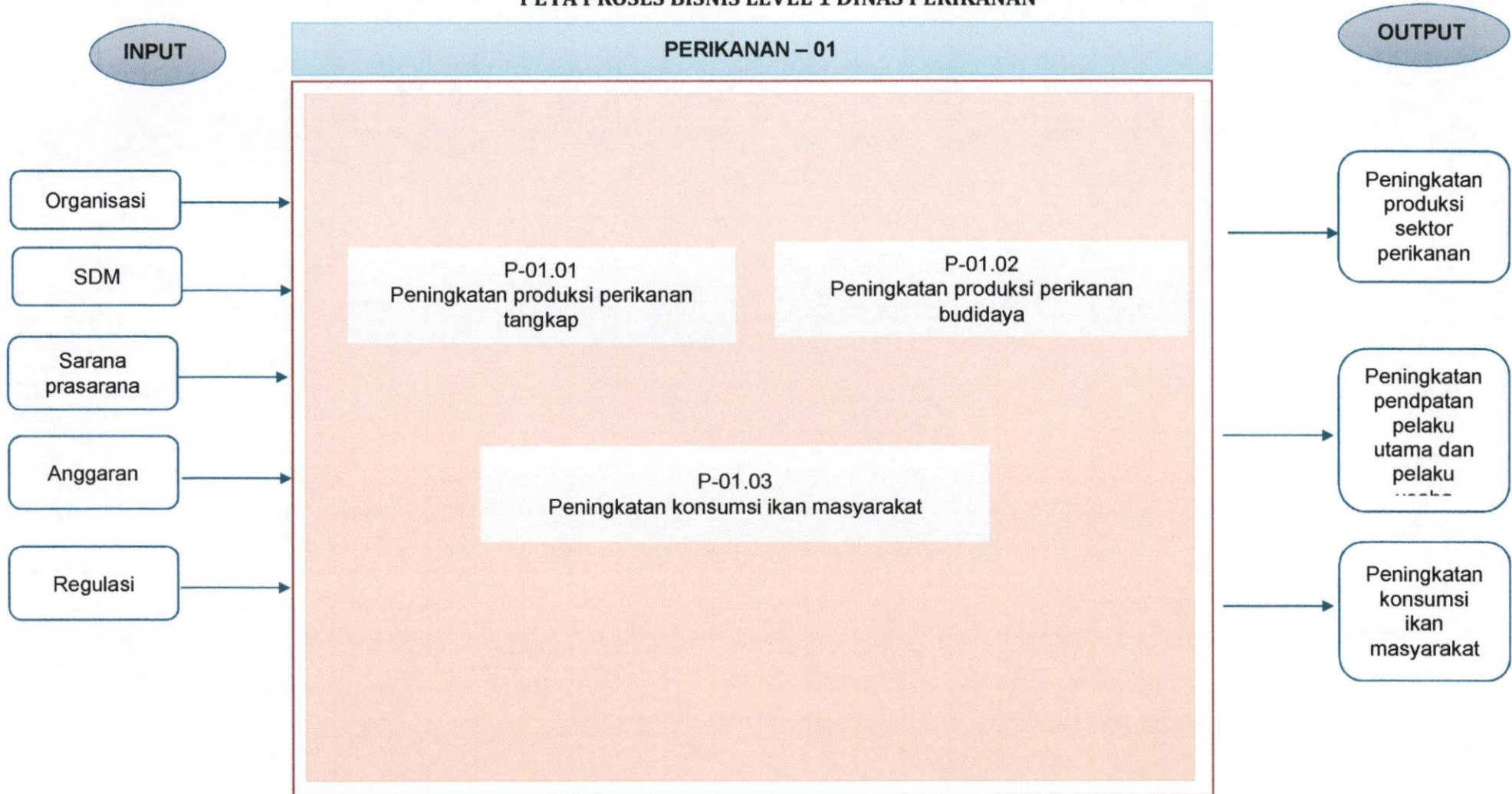




## B. BAGAN PETA PROSES BISNIS



### PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 DINAS PERIKANAN





**PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 DINAS PERIKANAN**

P-01.01

Peningkatan produksi perikanan tangkap

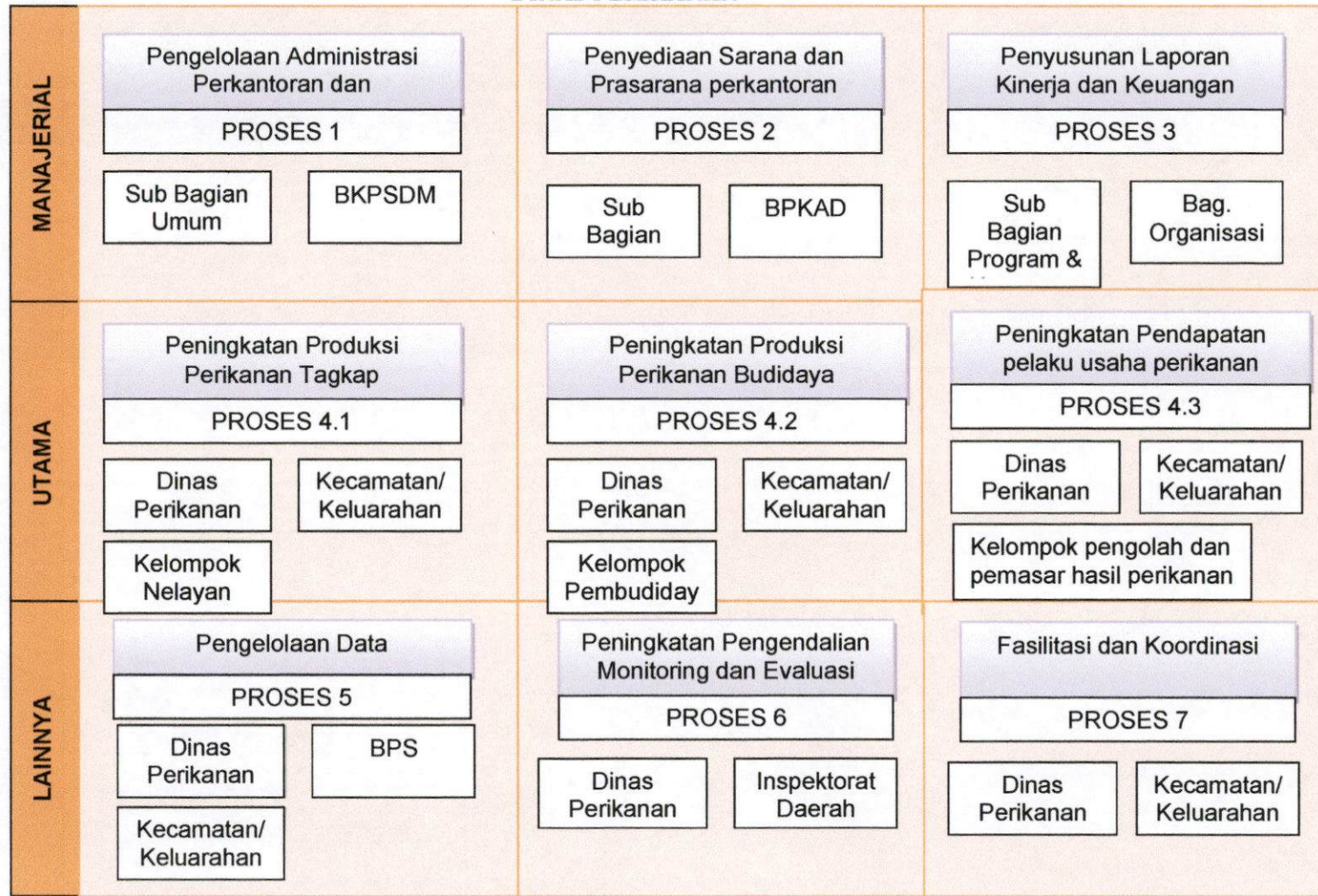
Penggunaan alat bantu dan penangkapan ikan yang modern dan ramah lingkungan

Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan

Penyediaan Sarpras Perikanan Tangkap yang Baik

Pemberian Kartu Nelayan Sejahtera, Asuransi Nelayan, Sertifikat Tanah

**PETA RELASI  
DINAS PERIKANAN**





## F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI LHE

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Pada pemenuhan implementasi Renstra dokumen anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Namun terdapat ketidaksamaan nama program antara Renja dengan DPA meskipun target yang ingin dicapai sama.
  - b. Setiap pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
2. Pengukuran Kinerja
  - a. Kualitas pengukuran
    - Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi
  - b. Implementasi Pengukuran
    - Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
    - Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan ( dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* dan *punishment*
3. Pelaporan Kinerja
  - a. Informasi yang disajikan belum sesuai kriteria dengan data yang bisa diandalkan
  - b. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
4. Evaluasi Internal
  - a. Kualitas Evaluasi
    - Evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai

contoh dalam kegiatan produksi perikanan tangkap laut capaian kinerjanya belum maksimal karena penggunaan alat tangkap yang masih belum efektif dan efisien dan solusi yang disajikan adalah hibah alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang pada kenyataannya tidak dapat menjadi solusi terhadap peningkatan produksi tangkap laut

b. Pemanfaatan Evaluasi

- Seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditidakanjuti karena tidak ada bukti laporan tindak lanjut dari hasil evaluasi
- Belum adanya ulasan efektif dan efisiensi terhadap laporan akuntabilitas kinerja



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Yang mengacu pada Visi Bupati Sampang.

***“Sampang Hebat Bermartabat”***

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi mengelola bidang perikanan sehingga mendukung **misi 2**, yaitu :

**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Adapun tujuan dari misi 2 ini adalah **“Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** dengan salah satu sasarannya adalah **“Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”**.

Selanjutnya ditetapkan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, yaitu :

**“Meningkatkan Pendapatan Sektor Perikanan”**

dengan indicator kinerja tujuan sebagai berikut :

- a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
- b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
- c. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)
- d. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, maka sasaran strategis yang dilaksanakan adalah :

**“ (1) Meningkatkan produksi perikanan tangkap, (2) Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan garam, (3) Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat”**

Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
3. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)
4. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)
5. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (Laut) dan (PUD)
6. Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dan garam
7. Angka konsumsi ikan kg/kapita/th

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten**  
**Sampang Tahun 2019-2024**

TUJUAN (1)	INDIKAOR TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR SASARAN (4)	TARGET					
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)
Meningkatkan pertumbuhan sector perikanan	1) Persentase pertumbuhan PDRB sector perikanan			5,36	5,46	6,71	6,01	6,36	6,76
	2) NTN,			101,9	102,4	103	103,7	104,6	105,6
	3) NTPi,			101	103	105	107	109	111
	4) NTPg			100	100	100	100	100	100
	5) NTPHP			100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap						
			a. laut	5,68	1,50	2,11	2,90	2,79	2,79
			b. PUD	15,38	2,38	2,33	3,00	3,3	3,5
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya						
			a. Budidaya	3,93	2,5	2,6	2,72	2,72	2,8
			b. Garam	-99,92	2,91	2,83	3,00	3,00	3,09
		Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka konsumsi ikan kg/kpt/th	27.6	27.6	32.89	33.5	40	41.5

*Sumber : Renstra Dinas Perikanan Kab. Sampang 2019 - 2024*



Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program atau kegiatan sebagai berikut :

**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

**2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang diletakkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Pada tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Sampang telah membuat perjanjian kinerja dengan Bupati Sampang dalam pencapaian kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja dalam hal ini berupa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan sehingga dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Sampang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha	1. Nilai Tukar	
		a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103
		b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	107



perikanan	c. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)	100
	d. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	100
	2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	
	a. Laut	2,90 %
	b. PUD	3,00%
	3. Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dan garam	
	a. Budidaya	2,72%
	b. Garam	3,00%
	4. Angka konsumsi ikan kg/kapita/th	33,5%

**Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2022**

Untuk mewujudkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 tersebut, upaya peningkatannya didukung program yang didanai APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.378.049.985,00	Sumber Dana DAU
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 583.624.588,00	Sumber Dana DAU + DAK
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.580.121.259,00	Sumber Dana DAU
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 356.519.185,00	Sumber Dana DAU

**Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp. 5.898.315.017,00.

Refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran yang kemudian disahkan melalui APBD Perubahan yang digunakan untuk melaksanakan 13 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program/Kegiatan Dan Anggaran Dinas Perikanan**  
**Tahun 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>5.898.315.017,00</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.378.049.985,00</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.727.738.924,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.727.738.924,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.975.000,00</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.975.000,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>291.171.546,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.461.538,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.828.211,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.414.473,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.288.364,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.080.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.818.960,00
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.940.775,00</b>
1	Pengadaan Mebel	9.563.400,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.377.375,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175.973.740,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.690.740,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.483.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.800.000,00
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>133.250.000,00</b>



1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.750.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.000.000,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>583.624.588,00</b>
1	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>460.288.983,00</b>
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	48.355.700,00
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	335.343.444,00
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	76.589.839,00
2	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>123.335.605,00</b>
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	103.534.580,00
2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	19.801.025,00
<b>III</b>	<b>PPROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.580.121.259,00</b>
1	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>1.137.263.288,00</b>
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1.053.938.670,00
2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	83.324.618,00
2	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>442.857.971,00</b>
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.304.971,00
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	396.113.000,00
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.440.000,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>356.519.185,00</b>

1	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>102.797.791,00</b>
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.797.791,00
2	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>122.664.003,00</b>
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	122.664.003,00
3	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>131.057.391,00</b>
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97.257.820,00
2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.799.571,00

Sumber anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022 terdiri dari APBD DAU dan DAK.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2022, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan Kabupaten Sampang.

Adapun pencapaian tujuan dari dinas Perikanan Kabupaten sampan hingga tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

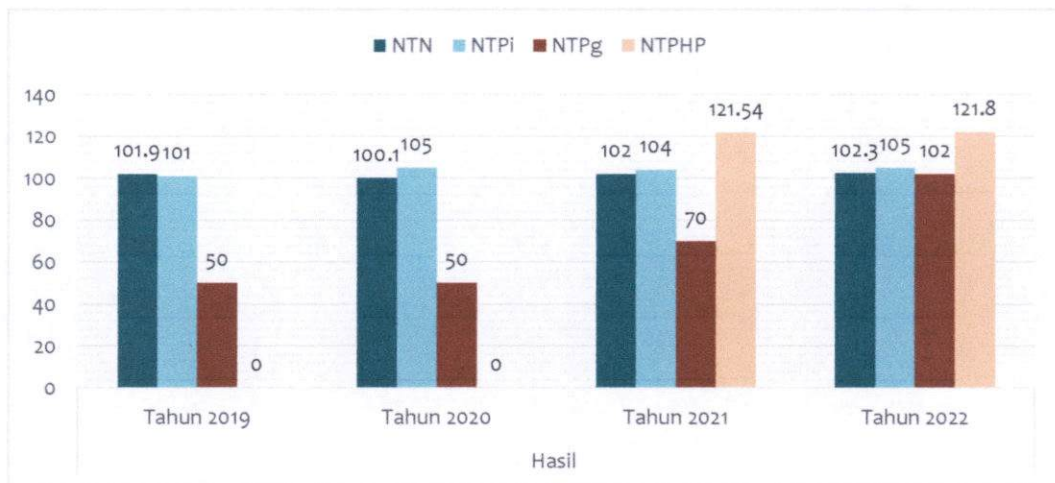
**TUJUAN :**  
**“Meningkatkan Pendapatan Sektor Perikanan”**

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui beberapa indicator kinerja yaitu Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, dan Pengolah Hasil Perikanan. Perkembangan capaian indicator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Indikator Tujuan Dinas Perikanan Tahun 2022**

No	Uraian Tujuan	Indicator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian (%)	
				2021	2022		
1	Meningkatkan Pendapatan Sektor Perikanan	1.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102	102	102,3	100,29
		1.2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	104	105	100,96
		1.3	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)	100	70	102	102
		1.4	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	100	121,54	121,80	121,8



a

**Gambar 1. Diagram Realisasi capaian indikator kinerja tujuan**

Berdasarkan tabel di atas dan berdasarkan perhitungan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka ini menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (it) dan indeks harga yang dibayar nelayan (ib). standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100.  $NTN > 100$ , harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.  $NTN = 100$  memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga

nelayan mengalami impas.  $NTN < 100$ , kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Target NTN pada tahun 2022 adalah sebesar 102 dengan realisasi NTN pada tahun 2022 sebesar 102,3 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,29%. Hal ini karena beberapa komoditas ikan harga naik yang menyebabkan nilai produksi meningkat.

2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil budidaya terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Secara definitif, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target NTPi pada tahun 2022 adalah sebesar 105 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu 104 mengalami peningkatan sebesar 0,96%.

3. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target NTPG pada tahun 2022 adalah 102 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 70 mengalami peningkatan 45,71%.

4. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target NTPHP pada tahun 2022 adalah 121,80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 121,54 mengalami peningkatan sebesar 0,21%.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas maka dilaksanakan program-program strategis yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Capaian kinerja beserta analisis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



### A.1 Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2022 dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD serta Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, maka Dinas Perikanan dalam pengukuran capaian keberhasilan pembangunan bidang perikanan dan kelautan memiliki indikator kinerja berupa prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat. Dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja meningkatnya produksi perikanan, indikator ini dihitung untuk menggambarkan seberapa besar prosentase peningkatan produksi perikanan apabila dihitung dari tahun dasar/baseline tahun 2019. Dalam tahun 2022 melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berikut akan dijelaskan mengenai tingkat capaian target dengan realisasi yang dicapai oleh Dinas Perikanan pada tahun 2022 sebagai berikut :

**Sasaran 1 :**

**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**

**Indikator Kinerja :**

- a) **Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (laut)**
- b) **Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (PUD)**

**Tabel 1**  
**Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (laut)	2,90% 15.934,29	1,05% 15.242,17 ton	95,66
	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (PUD)	3,00% 16 ton	-3,85 17,91 ton	111,94

**Sasaran 2 :**

**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**

**Indikator Kinerja :**

- c) **Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**
- d) **Persentase peningkatan produksi Garam Rakyat**

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi budidaya	2,72%	8,83%	92,71
		1.057 ton	980.040 ton	
	Persentase peningkatan produks garam rakyat	3,00%	-178	107,58
		50 ribu ton	53,79 ribu ton	

**Sasaran 3 :**

**Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat**

**Indikator Kinerja :**

**e) Angka konsumsi Ikan kg/kapita/th**

**Tabel 3**  
**Pencapaian Kinerja konsumsi ikan masyarakat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Konsumsi ikan perkapita/th	33,5 kg/kpt/th	42,81 kg/kpt/th	127,7

Berdasarkan pada beberapa tabel serta grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, indikator sasaran yang telah ditargetkan mampu tercapai dengan rata-rata tingkat capaian dari indikator kinerja sebesar 107,11%. Sasaran Peningkatan produksi perikanan ataupun meningkatnya konsumsi ikan masyarakat dipengaruhi oleh :

1. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 15.260,08 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap laut sebesar 15.242,17 ton atau 95,66 % dari target yang sudah ditentukan dan Produksi perikanan tangkap perairan umum daratan ( PUD ) sebesar 17,91 ton atau 111,94% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 15.102,08, produksi ini mengalami peningkatan sebesar 158 ton atau 1,01 %. Peningkatan Produksi perikanan tangkap terjadi dipengaruhi oleh adanya faktor peningkatan trip melaut yang dilakukan oleh nelayan serta pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan ( API ) oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang berupa Global Positioning system ( GPS ) untuk memudahkan nelayan dalam mencapai titik penangkapan ikan yang



diinginkan serta pemberian bantuan kegiatan restocking Perairan Umum Daratan ( PUD ) di 3 lokasi Waduk di Kabupaten Sampang. Di samping bantuan tersebut di atas, Dinas Perikanan juga memberikan sarana keselamatan bagi nelayan berupa pemberian jaket pelampung lifejacket. Capaian Produksi Perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 15.260,08 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap laut sebesar 15.242,17 ton dan Produksi perikanan tangkap perairan umum daratan ( PUD ) sebesar 17,91 ton, jika dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 15.102,08 mengalami peningkatan sebesar 158 ton atau 1,01 % dan realisasi terhadap target sebesar 95,67 %. Belum tercapainya realisasi target produksi perikanan tangkap dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan tangkap ( Laut dan PUD ) yang dilakukan oleh nelayan hal ini disebabkan karena penggunaan alat tangkap yang masih belum efektif, efisien dan menurunnya daya dukung ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut program dan kegiatan Dinas Perikanan diarahkan pada upaya pemberdayaan nelayan kecil salah satunya melalui pemberian Hibah Alat penangkapan ikan ramah lingkungan ( DAK, APBD Provinsi dan APBN ) yang di harapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan di Laut. Disamping upaya pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan juga melakukan kerjasama dengan Satpolair Polres sampang berupa penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dan fasilitasi program kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang sifatnya memperbaiki dan merehabilitasi sumberdaya ikan ( SDI ) di Laut Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui pengadaan Rumah Ikan ( Fish Apartement ) dan Terumbu Karang Buatan ( TKB ).

2. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 mencapai 980,04 ton atau 92,71% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 1.057 Ton, produksi ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,83% atau 86,55 ton. Peningkatan produksi perikanan budidaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik dan Benar ( CBIB ) di kalangan pembudidaya ikan;
- b. Penggunaan benih ikan unggul yang berkualitas, di mana benih ikan unggul sangat berpengaruh pada proses produksi perikanan sehingga berpengaruh dalam peningkatan produksi perikanan;
- c. Pemberian bantuan sarana dan prasarana serta pendampingan bagi pembudidaya ikan mengenai metode budidaya ikan yang efektif dan efisien, seperti metode budidaya ikan sistem kolam terpal system bioflok serta penerapan manajemen perikanan sehat melalui aplikasi probiotik dalam produksi perikanan.

Belum tercapainya realisasi terhadap target produksi perikanan budidaya disebabkan oleh beberapa faktor karena adanya penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang budidaya udang vanamei yaitu AHPND, WS dan biaya produksi (harga pakan) yang cenderung naik sehingga pembudidaya mengurangi jumlah penebaran benih sehingga mengurangi jumlah produksi.

3. Produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang pada tahun 2022 mencapai 53,79 ribu Ton, produksi ini menurun 96,15 ribu ton dari tahun 2021 sebesar 149,94 Ton. Namun produksi garam di tahun 2022 mencapai 107,58% dari target pada tahun 2022 sebesar 50 ribu Ton. Menurunnya produksi garam di Kabupaten sampang disebabkan adanya beberapa faktor yaitu:
  - a. Harga garam yang tergolong masih rendah sehingga mengakibatkan biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang didapat ,sehingga berakibat pada penurunan minat petambak garam untuk melakukan produksi garam;
  - b. Proses produksi garam masih dalam tahap pemulihan kembali akibat pandemic covid-19;
  - c. Faktor cuaca yang mempengaruhi masa produksi garam, di mana produksi garam hanya bisa dilakukan selama 2 sampai 3 bulan saja dari biasanya yang bisa mencapai 5 bulan per musim;
  - d. Adanya alih fungsi lahan produksi garam menjadi lahan produksi budidaya ikan yang lebih menjanjikan.



4. Angka konsumsi ikan pada tahun 2022 mencapai 42,81 kg/kpt/th atau mencapai 127,7% dari target sebesar 33,5 kg/kpt/th. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Sampang menunjukkan adanya pengaruh dari beberapa kegiatan rutin yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan seperti Program Gemarikan yang dilakukan di beberapa Daerah stunting. Selain itu dengan adanya produk olahan ikan meningkatkan pola konsumsi ikan masyarakat.

#### A.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran dari kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022. Maka dijabarkan sebuah tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun Kemarin**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi		
			Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (laut)	2,90% (15.934,29 ton)	6,71 (15.151,5 ton)	-0,45% (15.083,48 ton)	1,05% (15.242,17 ton)
	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (PUD)	3,00% (16 ton)	-3269 (15,6 ton)	16,12% (18,6 ton)	-3,85% (17,91 ton)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2,72% (1.057 ton)	19,99 (1.050,52 ton)	-17,57% (893,493 ton)	8,83% (980,04 ton)
	Persentase peningkatan produksi garam rakyat	3,00% (50 rb ton)	-105% (174,594 rb ton)	-16,43% (149,947 rb ton)	-178% (53,79 rb ton)
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka konsumsi ikan perkapita	35,5 kg/kpt/th			42,81 kg/kpt/th

### A.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Akhir Periode Renstra

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mentargetkan bahwa produksi perikanan pada akhir tahun Renstra 2024 untuk perikanan tangkap Laut 16.822,72 dapat meningkat 2,8% atau 458,21 Ton, sedangkan untuk perikanan tangkap PUD dapat meningkat budidaya dapat meningkat 7,42% atau 1,41 Ton. Produksi perikanan budidaya pada akhir renstra 2024 sebesar 1.228 ton dapat meningkat 7,08% atau 87 ton. Pada Tahun 2022 capaian produksi perikanan tangkap telah mencapai 980,04 ton atau 95,66% dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022, sedangkan untuk perikanan budidaya telah mencapai produksi 980,04 ton atau 92,71 % dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022. Selain produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan oleh angka konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun.

### A.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Realisasi Nasional dan Provinsi

Produksi perikanan Kabupaten Sampang merupakan salah satu penyumbang produksi perikanan untuk Provinsi Jawa Timur, produksi perikanan pada tahun 2022, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya memiliki kontribusi terhadap pencapaian produksi perikanan secara nasional maupun produksi perikanan provinsi Jawa Timur., hal ini dapat kita jelaskan melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel Kontribusi Produksi Perikanan Kabupaten Sampang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional**

Produksi Perikanan	Nasional Realisasi 2021	Kab. Sampang Realisasi 2021	Kontribusi	Nasional Realisasi 2022	Kab. Sampang Realisasi 2022	Kontribusi
Perikanan Tangkap	8.008.000 ton	15.102,08	0,18%		15.260,08 ton	
Perikanan Budidaya	19.470.000 ton	893,493 ton	0,004%		980,04 ton	
<b>Catatan :</b> Data Produksi Perikanan Nasional Tahun 2021 Berdasarkan Aplikasi Statistik KKP.go.id dan Data Produksi Perikanan Nasional Tahun 2022 Diolah dari Berbagai sumber						
Produksi Perikanan						



	Provinsi Jawa Timur Realisasi 2021	Kab. Sampang Realisasi 2021	Kontribusi	Provinsi Jawa Timur 2022	Kab. Sampang Realisasi 2022	Kontribusi
<b>Perikanan Tangkap</b>	417.614,20 ton	15.102,08 ton	3,61%	545.227,88 ton	15.260,08 ton	2,79%
<b>Perikanan Budidaya</b>	1.264.158,71 ton	893,493 ton	0,07%	1.279.954,23 ton	980,04 ton	0,07%

Catatan : Produksi Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Adalah Angka Estimasi Sampai Dicitaknya Laporan Kinerja Ini.

#### **A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Dinas Perikanan pada tahun 2022 sesuai dengan target pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator kinerja keberhasilan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Sampang ditetapkan berupa prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya, dan Angka konsumsi ikan perkapita. Pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang pada capaian sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap laut dengan target sebesar 2,90% telah tercapai sebesar 1,05% atau 276,19% dengan produksi sebesar 15.242,17 Ton, prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya dari target sebesar 2,72% telah tercapai sebesar 8,83% atau 321% dengan produksi sebesar 980,04 Ton, dan target meningkatnya konsumsi ikan masyarakat dengan indikator angka konsumsi ikan perkapita dengan target 35,4 kg/kpt/th telah tercapai sebesar 42,81 kg/kpt/th atau 127,7%. Peningkatan konsumsi ikan dipengaruhi oleh tingkat produksi ikan yang mencapai target dan terus meningkat hasil produksinya.

#### **A.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2022, besaran anggaran program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mengalami refocusing anggaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang. Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui 4 program dengan 13 kegiatan nilai pagu anggaran senilai Rp. 5.898.315.017,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.653.093.377,00 atau 95,84%. Berikut akan dijelaskan efisiensi penggunaan sumber daya melalui tabel matriks sebagai berikut :

**Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (laut)	95,66	87,91	7,78
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (PUD)	111,94	87,91	27,03
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	92,71	98,85	6,14
		Persentase peningkatan produksi garam rakyat	107,58	98,85	8,73
3	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka konsumsi ikan perkapita	127,7	92,44	35,26

Berdasarkan pada matriks tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari ketiga sasaran yang dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang memiliki hasil yang sangat baik, hal ini dapat dilihat pada tingkat capaian efisiensi yang tinggi pada sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap yang mencapai 7,78, sedangkan tingkat efisiensi pencapaian target peningkatan produksi perikanan budidaya dan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat masing- masing 6,14 dan 35,26.

#### **A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang pada tahun 2022 melaksanakan 4 Program dengan 13 kegiatan, dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Sampang, program kegiatan yang dilaksanakan tersebut menunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama dimana program-program yang memiliki efek secara langsung terhadap pencapaian target kinerja yaitu program pengelolaan perikanan budidaya, program pengelolaan perikanan tangkap, dan program pengolahan dan



pemasaran hasil perikanan. Ketiga program yang dilaksanakan tadi merupakan program yang memiliki dampak secara langsung pada pencapaian indikator sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, dan peningkatan konsumsi ikan perkapita. Dalam pelaksanaan urusan perikanan di Kabupaten Sampang terdapat :

#### 1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan khususnya pada sektor penangkapan ikan perairan umum daratan sesuai kewenangan dinas Perikanan Kabupaten Sampang tentang pengelolaan perikanan umum daratan
- b. Belum optimalnya penerapan CBIB serta penggunaan benih ikan unggul ( bebas penyakit, ukuran seragam ) di kalangan pembudidaya ikan
- c. Fluktuasi harga jual komoditas perikanan
- d. Belum optimalnya frekuensi pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan, baik pembudidaya ikan maupun nelayan masih rendah
- e. Perlu adanya peningkatan standar pada produk olahan hasil perikanan khususnya pada penanganan pasca panen dengan penerapan sistem rantai dingin pada saat penanganan maupun distribusi hasil produk perikanan

#### 2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pendataan, perencanaan, serta pengadaan bantuan prasarana dan sarana pengembangan sektor perikanan umum daratan
- b. Optimalisasi perairan tangkap umum daratan melalui kegiatan rehabilitasi serta restocking potensi perikanan sektor perairan umum daratan
- c. Pentaan kelembagaan dan pendataan potensi perikanan di wilayah perairan umum daratan
- d) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis manfaat penerapan CBIB ( Cara Budidaya Ikan Yang Baik ) dalam proses pembudidayaan ikan.
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan aplikasi probiotik dan pupuk

organik dalam budidaya ikan demi mengurangi ketergantungan pembudidaya ikan dalam penggunaan pupuk anorganik

- e. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan cara pengolahan ikan yang baik bagi UMKM/Pengolah Hasil Perikanan melalui kegiatan peningkatan mutu nilai tambah dan diversifikasi usaha
- f. Pemberian bantuan sarana penanganan hasil perikanan dalam mendukung peningkatan kualitas hasil perikanan melalui sistem distribusi rantai dingin.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan di DPPA APBD tahun 2022. Adapun jumlah APBD Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.898.315.017 dan terealisasi sebesar Rp. 5.653.093.377 atau mencapai 95,84 % dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang**

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	5.898.315.017,00	5.653.093.377,00	95,84
Belanja Operasi	5.860.374.242,00	5.620.693.597,00	95,91
Belanja Pegawai	2.706.738.924,00	2.607.772.928,00	96,34
Belanja Barang dan Jasa	1.510.427.398,00	1.423.198.091,00	94,22
Belanja Modal	37.940.775,00	32.399.780,00	85,40

Anggaran Belanja sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah yang melekat pada perangkat daerah serta program-program strategis perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas perikanan Kabupaten Sampang.

Realisasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2022 berdasarkan program dan perbandingannya dengan realisasi tahun lalu adalah sebagai berikut :



**Tabel**  
**. Anggaran dan Realisasi Program Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>5,898,315,017.00</b>	<b>5,653,093,377.00</b>	<b>95.84</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,378,049,985.00</b>	<b>3,248,514,373.00</b>	<b>96.17</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,727,738,924.00</b>	<b>2,625,772,928.00</b>	<b>96.26</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,727,738,924.00	2,625,772,928.00	96.26
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11,975,000.00</b>	<b>4,317,000.00</b>	<b>36.05</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11,975,000.00	4,317,000.00	36.05
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>291,171,546.00</b>	<b>289,220,500.00</b>	<b>99.33</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,461,538.00	10,358,500.00	99.02
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,828,211.00	41,790,000.00	99.91
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,414,473.00	27,669,000.00	97.38
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,288,364.00	18,282,000.00	99.97
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,280,000.00	1,560,000.00	68.42
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,080,000.00	10,080,000.00	100.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179,818,960.00	179,481,000.00	99.81
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37,940,775.00</b>	<b>32,399,780.00</b>	<b>85.40</b>
1	Pengadaan Mebel	9,563,400.00	9,320,950.00	97.46
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,377,375.00	23,078,830.00	81.33
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175,973,740.00</b>	<b>168,158,365.00</b>	<b>95.56</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,690,740.00	5,659,200.00	99.45
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78,483,000.00	70,699,165.00	90.08
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91,800,000.00	91,800,000.00	100.00

6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	133,250,000.00	128,645,800.00	96.54
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,750,000.00	35,322,700.00	88.86
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,500,000.00	20,451,210.00	99.76
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73,000,000.00	72,871,890.00	99.82
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	583,624,588.00	513,065,934.00	87.91
1	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	460,288,983.00	397,201,576.00	86.29
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	48,355,700.00	29,891,064.00	61.81
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	335,343,444.00	333,742,512.00	99.52
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	76,589,839.00	33,568,000.00	43.83
2	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	123,335,605.00	115,864,358.00	93.94
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	103,534,580.00	97,565,900.00	94.24
2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	19,801,025.00	18,298,458.00	92.41
III	<b>PPROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	1,580,121,259.00	1,561,932,365.00	98.85
1	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	1,137,263,288.00	1,121,739,715.00	98.64
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1,053,938,670.00	1,040,905,715.00	98.76
2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	83,324,618.00	80,834,000.00	97.01
2	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	442,857,971.00	440,192,650.00	99.40
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34,304,971.00	33,827,000.00	98.61
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	396,113,000.00	393,980,650.00	99.46



3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12,440,000.00	12,385,000.00	99.56
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>356,519,185.00</b>	<b>329,580,705.00</b>	<b>92.44</b>
<b>1</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>102,797,791.00</b>	<b>102,373,600.00</b>	<b>99.59</b>
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102,797,791.00	102,373,600.00	99.59
<b>2</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>122,664,003.00</b>	<b>119,220,300.00</b>	<b>97.19</b>
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	122,664,003.00	119,220,300.00	97.19
<b>3</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>131,057,391.00</b>	<b>107,986,805.00</b>	<b>82.40</b>
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97,257,820.00	74,986,192.00	77.10
2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33,799,571.00	33,000,613.00	97.64

**Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (laut)	583.624.588	9,89%
		Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (PUD)		
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaa	1.580.121.259	26,78%
		Prosentase peningkatan produksi garam rakyat		
3	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka konsumsi ikan perkapita	356.519.185	6,04%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran I</b>							
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (laut)	2,90%	1,05%	36,20%	583.624.588	513.065.934	87,91%
	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (PUD)	3,00%	-3,85	-128,33			
<b>Sasaran II</b>							
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2,72%	8,83%	324,6%	1.580.121.259	11.561.932.365	93,94
	Prosentase peningkatan produksi garam rakyat	3,00%	-178%	-5933%			
<b>Sasaran III</b>							
Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka konsumsi ikan perkapita	35,5 kg/kpt/th	42,81 kg/kpt/th	127,7%	356.519.185	329.580.705	92,44

### C. Tindak Lanjut LHE

Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Kabupaten Sampang, Dinas Perikanan telah melakukan beberapa tindak lanjut diantaranya :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		INDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja	
	Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran (telah dimanfaatkan dalam penyusunan DPA tahun 2022)
	Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor	Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor



REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		INDAK LANJUT
	pencapaiannya secara berkala	pencapaiannya secara berkala (telah dimonitor dengan adanya perubahan target pada beberapa indicator kinerja)
2	Pengukuran Kinerja	
	Agar dibuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja	Telah dibuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi
	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/trriwulanan/semester)	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala (bulanan/trriwulanan/semester) sengan menggunakan aplikasi SIEVKA
3	Pelaporan Kinerja	
	Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumberdaya	Telah terdapat analisis efesiensi penggunaan sumberdaya pada laporan kinerja tahun 2021 Dinas Perikanan
4	Evaluasi Internal	
	Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Hasil evaluasi telah disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan melalui rapat internal Dinas Perikanan
5	Pemanfaatan Evaluasi	
	Hasil evaluasi agar sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	Hasil telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sebagaimana berikut :

1. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan Pembangunan Perikanan Daerah;
2. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan perikanan;
3. Masih minimnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan budidaya
4. Masih kurangnya sarana prasarana bidang Perikanan
5. Lemahnya kesadaran pengolah hasil perikanan tentang pentingnya produk olahan ikan yang higienis dan bermutu.
6. Terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan teknis di bidang Perikanan
7. Optimalisasi sistem Pengendalian dan evaluasi perencanaan program Perikanan
8. Pelayanan Publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
9. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan baik berupa pemberian jaminan social bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
10. Bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan dan peran pembudidaya ikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
11. Masih rendahnya akses permodalan, sarana/alat, rantai distribusi dan kelembagaan pada usaha kecil bidang perikanan.
12. Rendahnya teknologi dan diversifikasi pengolahan produk hasil perikanan.
13. Belum tersedianya data yang akurat dan memadai bidang perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan



Kabupaten Sampang yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SAMPANG



**WAHYU PRIHARTONO, MM**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 196512291994031002

